

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Kebijakan Legislative dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Asshidiqie, Jimly, Safa'at, M. Ali, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta.
- Atmasasmita Romly, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bakri Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, Surachman, R.M., 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kaelan dan Zubaidi Achmad, 2007, *Pendidikan Kewarga negaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahfud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Nawawi Barda., 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Poernomo Bambang, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Priyatno Dwija, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, Bandung.

Sahetapy, J.E dan Reksodiputro, Mardjono, 1982, *Paradoks dalam Kriminologi*, CV Rajawali, Jakarta.

Sianturi S.R., 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.

Soekanto Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, 1990 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung

Sudaryo & Surbakti Natangsa, 2005, *Buku Pegangan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Sunggono Bambang., 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tomb, David A., 1999, *Buku Saku Psikiatri*, Penerbitan Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Widodo dan Utami Wiwik, 2014, *Hukum Pidana dan Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

Eddyono, Supriyadi Widodo, Prospek Penggunaan “Pelaku yang Bekerjasama” di Indonesia *Jurnal LPSK*, Edisi ke 1.

Mulyadi Lilik, “Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia” di *Jurnal Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1- No 3- Tahun 2014.

Nurjana, I Nyaman, Penanggulangan Kejahatan Narkotika: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, Malang.

C. Hasil Penelitian/ Tugas akhir

Artantojati Sigit, 2012, Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), *Tesis*, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Bagasuri Yusti, 2012, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Whistleblower Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Depari, Eben Haezer S. 2009, Implementasi Pemberian Remisi Khusus Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.

Mudharto, M. Ali., 2013, Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Widhiathna, Ahimsa S., 2010, Analisis Yuridis terhadap Legalitas Tindakan Penahanan oleh Mabes Polri terhadap Dua Pimpinan Non Aktif KPK dan Kaitanya dengan Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Pidana, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

D. Makalah / Pidato

Pidato Abdul Harris Semendawai, disampaikan dalam Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 17 april 2013.

E. Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4960.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5602.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000.

United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003.

Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Bersama Menteri Hukum HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor:Per-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011, tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi pelaku yang bekerjasama.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*).

F. Internet

- Asy, Belajar tentang *Justice Collaborator* dari Belanda, <http://news.detik.com/read/2013/03/09/131018/2190269/10/belajar-tentang-justice-collaboratordari-belanda>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2016.
- Baradhina, SM. Kejahatan Transnasional dalam Penyelundupan Obat-Obatan Terlarang <http://baradhina-alhafizh.blogspot.co.id/2010/12/kejahatan-transnasional-dalam.html>, diakses pada 5 januari 2016.
- BNN, Humas, Indonesia Darurat Narkoba, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/20/bnn-indonesia-darurat-narkoba> diakses pada 5 Januari 2016.
- BNN, Humas Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/06/19/658/remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba> diakses pada 5 januari 2016.
- Hakim, Luqman, Wamenkumham: pengungkapan kasus strategis perlu "Justice Collaborator", <http://jogja.antaranews.com/berita/326398/wamenkumham-pengungkapan-kasus-strategis-perlu-justice-collaborator>, diakses pada 5 Maret 2016.
- Hartana, Totok, Merespon Justice Collaborator, <http://m.beritametro.co.id/catatan-metro/merespon-justice-collaborator>, diakses 2 Maret 2016.
- Merdeka.com, Pengguna Narkotika di Indonesia Pada 2015 Capai 2,5 Juta Jiwa, <https://id.berita.yahoo.com/pengguna-narkotika-di-indonesia-pada-2015-capai-5-060009517.html>, diakses 6 November 2015.
- Novian Rully, Saksi Pelaku Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Peraturan dan Rancangan KUHAP. https://www.academia.edu/7548477/Saksi_Pelaku_Bekerjasama_justice_Collaborator_Dalam_Peraturan_dan_Rancangan_KUHAP_Oleh diakses pada 12 Januari 2016.
- Nurdin, M., Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui Penguatan Lembaga Badan Narkotika Nasional sebagai Amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2013/05/07/MATERI_KOMISI_3_REVISI_2.pdf, diakses pada 30 Maret 2016.
- Pratama, Awan, Sinergitas BNN, TNI dan Polri dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika, <http://www.bnn.go.id/read/artikel/15156/sinergitas-bnn-tni-dan-polri-dalam-mengatasi-permasalahan-narkotika>, diakses pada 30 Maret 2016.

Reksodiputro, Mardjono, Beberapa catatan tentang *Justice Collaborator* dan bentuk perlindungannya,
<http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2013/11/beberapa-catatan-tentang-justice.html>, diakses pada 5 Maret 2016.

Safitri, Ahmad Reza, Pengamat: Lihat Sejarah Remisi itu Hadiah bukan HAM.,
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/10/m0nn0s-pengamat-lihat-sejarah-remisi-itu-hadiah-bukan-ham> diakses pada 30 November 2015.

Saragi, Marry Margaretha, Keabsahan Menggunakan Tersangka Sebagai Saksi dalam Persidangan,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50ec06251d12a/keabsahan-penggunaan-tersangka-sebagai-saksi-di-persidangan>, Diakses pada Tanggal 1 Januari 2016.

Silaen, Victor, Remisi Bagi Koruptor,
<http://nasional.sindonews.com/read/979048/18/remisi-bagi-koruptor-1426816601/2>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2016.

Sinaga, Eri Komar, *Indonesia Tertinggi Penyalahgunaan Narkotika di Asia Tenggara*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/12/indonesia-tertinggi-penyalahgunaan-narkotika-di-asia-tenggara>, diakses 6 November 2015,.

Tribun News, BNN, Indonesia Darurat Narkoba, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/20/bnn-indonesia-darurat-narkoba> diakses pada 5 Januari 2016.

Yudhi, Dedihumas Badan Narkotika Nasional, "*Sejarah Singkat Narkoba*" <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> diakses 6 November 2015.

Zaka dan Yatno, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Hukum Tak Lagi Dilimpahkan ke Lapas/ Rutan,
<http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/31-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-proses-hukum-tak-lagi-dilimpahkan-ke-lapas-rutan#sthash.cdBvanVF.dpuf>, diakses 6 November 2015.

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, 26 November 2013.

H. Dokumen Lain

BNN, Humas, Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba tahun Anggaran 2014.

Potret Saksi dan Korban Dalam 2011 Media Massa, Majalah LPSK.

BNN, Humas, Press release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional 2015.